



Penetapan Paslon Terpilih Molor

PENETAPAN pasangan calon (paslon) Wali Kota-Wakil Wali Kota Yogyakarta terpilih periode 2017-2022 dipastikan mundur. Hal itu karena adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kubu paslon nomor urut 1, Imam Priyono-Achmad Fadli.

Sesuai jadwal tahapan Pilwali Yogyakarta 2017, penetapan paslon terpilih dilaksanakan pada 8-10 Maret 2017 dengan catatan tidak ada gugatan perselisihan hasil rekapitulasi suara ke MK.

"Sekarang sedang proses pengajuannya gugatan ke MK. Jadi kami tidak menjadwalkan penetapan paslon pada tanggal itu. Saat ini kami menunggu materi pokok apa yang digugat ke MK," kata Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto, kemarin.

Menurutnya, pokok materi gugatan di MK baru diputuskan pada 13-16 Maret 2017. Setelah nanti ada kejelasan materi gugatan, pihaknya akan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan menghadapi proses pemeriksaan di MK. Wawan memastikan selama ini KPU sebagai penyelenggara pilkada bekerja sesuai prosedur dan peraturan.

Karena itu, pihaknya siap menghadapi gugatan ke MK yang dilayangkan kubu Imam-Fadli. "Kalau kami sudah tahu materinya yang digugat apa, baru kami akan siapkan jawaban dan alat buktinya," kata Wawan.

Mengacu pada Peraturan MK No 3/2017 terkait tahapan kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, pemeriksaan perkara terhadap gugatan yang diajukan pada 13-30 Maret 2017. Sedangkan putusan perkara perselisihan hasil pilkada bupati dan wali kota pada 10-19 Mei 2017 atau paling lama 45 hari kerja sejak permohonan gugat-

an dicatat.

Terpisah, Ketua Tim Pemantauan Imam-Fadli, Danang Rudyatmoko mengatakan, materi gugatan selain mempertanyakan banyaknya surat suara tidak sah, juga menyangkut ada perbedaan tafsir di tingkat penyelenggara serta dokumen kependudukan pemilih yang tidak terdata.

Saat mendaftar gugatan ke MK, Senin (27/2) lalu, pihaknya membawadokumen sebagai pelengkap bukti formil dan materiil sebanyak 300 lembar lebih. Banyaknya alat bukti yang diperoleh diakuinya semakin menambah rasa optimisme gugatan akan dikabulkan MK. "Ada banyak data pendukung yang turut kami sampaikan, termasuk semua hasil rekapitulasi berjenjang sehingga cukup tebal," katanya.

Namun yang menjadi sorotan utama, lanjutnya, adalah surat suara tidak sah naik 400 kali lipat dibanding dengan jumlah suara tidak sah pada Pilpres 2014 yang hanya sekitar 3.400 suara. "Ini juga sudah menjadi sorotan nasional, kok bisa di Kota Yogyakarta suara tidak sahnya mencapai belasan ribu. Dari sini kami menilai ada dugaan kecurangan terstruktur," kata Ketua DPC PDIP Kota Yogyakarta itu.

Sesuai pendaftaran gugatan, pihaknya kini menunggu hasil pemeriksaan awal oleh MK apakah berkas gugatan memenuhi syarat atau tidak untuk ditindaklanjuti dan diperiksa di muka persidangan. Tak hanya ke MK, kubu Imam-Fadli juga menyambangi Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta. Mereka melaporkan jajaran KPU dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kota Yogyakarta atas tuduhan inkonsisten dalam proses penyelenggaraan Pilwali Yogyakarta 2017.

ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005